

**KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN KUOTA HAJI DI
INDONESIA TAHUN 1950-1971 M**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.)

Oleh:

Shobihatul Badi'ah

(NIM: 1810101020044)

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

NOTA DINAS

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN KUOTA HAJI DI INDONESIA

TAHUN 1950-1971 M

Yang ditulis oleh:

Nama : Shobihatul Badi'ah

NIM : 18101020044

Program Studi : S1 / Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 April 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Maharsi, M. Hum.

NIP: 19711031 20003 1 00 1

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-720/Un.02/DA/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia Tahun 1950-1971 M

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOBIHATUL BADI'AH
Nomor Induk Mahasiswa : 18101020044
Telah diujikan pada : Senin, 15 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Maharsi, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647305990ec75



Penguji I

Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646f20788065f



Penguji II

Riswinarno, S.S., M.M.
SIGNED

Valid ID: 646a33e30dec3



Yogyakarta, 15 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64744fe80d478

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shobihatul Badi'ah
NIM : 18101020044
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia Tahun 1950-1971 M" adalah hasil dari pemikiran peneliti sendiri bukan dari hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan dan telah dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah dan tercantum pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka segala tanggung jawab pada peneliti sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai mestinya

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 April 2023

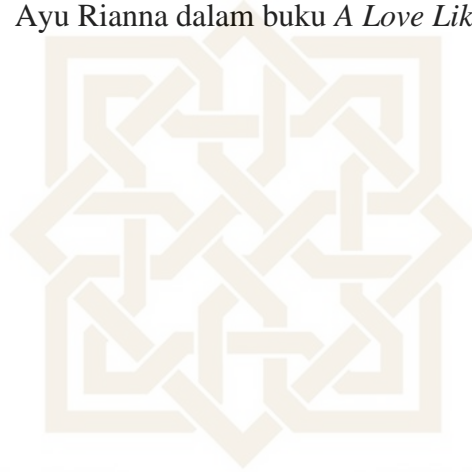
Yang menyatakan,


Shobihatul Badi'ah

MOTTO

“Pernah gagal satu kali bukan berarti kita tidak akan berhasil jika mencobanya
lagi”

Ayu Rianna dalam buku *A Love Like This*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan atas semua nikmat, kemudahan, ridho, dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. Tidak henti saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Berkat doa dan dukungannya skripsi ini dapat saya selesaikan.

Saya persembahkan skripsi ini kepada Orang tua saya, Ibu dan Bapak saya, serta kakak saya. Tak lupa kepada seluruh teman-temanku yang telah mendukung saya selama ini. Skripsi ini saya persembahkan juga untuk diri saya sendiri yang sudah bekerja keras selama penelitian ini berlangsung.

Terima kasih banyak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia Tahun 1950-1971 M

Pemberangkatan ibadah haji tahun 1950 diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya. Kuota haji didistribusikan untuk 10.000 jamaah haji. Transportasi dan devisa yang terbatas, serta adanya pembatasan dari pemerintah Arab Saudi karena minimnya pemondokan di sana. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia untuk membatasi jamaah haji yang akan diberangkatkan ke tanah suci.

Kuota haji yang didistribusikan oleh Kementerian Agama tidak pasti setiap tahunnya, terkadang meningkat ataupun menurun. Ketidakpastian tersebut membuat Kementerian Agama menyesuaikan jumlah kuota haji yang akan didistribusikan setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan dampak dari kebijakan pendistribusian kuota haji dari tahun 1950-1971 M. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana munculnya kebijakan pendistribusian kuota haji di Indonesia, mengapa kebijakan pendistribusian kuota haji tahun 1950-1971 berbeda, dan apa faktor serta dampak dari kebijakan pendistribusian Kuota Haji tahun 1950-1971. Teori kebijakan oleh Richard Titmuss digunakan sebagai alat analisis, sedangkan pendekatan politik dan ekonomi untuk menggambarkan kondisi politik dan ekonomi Indonesia selama tahun penelitian. Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini tahapannya adalah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan ketidakstabilan pendistribusian kuota haji setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ekonomi, politik, transportasi, dan minat berhaji. Sedangkan dampak dari kebijakan pendistribusian haji adalah jamaah haji harus menunggu waktu yang cukup lama, jamaah haji Indonesia menjadi jamaah haji yang paling tertib di seluruh dunia. Kebijakan antara Orde Lama dan Baru berbeda satu sama lain. Pada Orde Lama kuota haji diterapkan, namun di Orde Baru kebijakan tersebut dihapuskan.

Keyword: Kuota haji, Penyelenggaraan Haji, Kebijakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Penyayang dan Pengasih yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Tanpa kekuatan dan kebesaran-Nya peneliti tidak bisa sampai di titik ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Kebijakan Kuota Haji di Indonesia Tahun 1950-1971 M” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dalam dukungan moril, materil, maupun spiritual. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam dan juga sebagai Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberi arahan dan bimbingan selama menjadi mahasiswa.
4. Dr. Maharsi, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan banyak arahan, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per

satu. Terima kasih atas kesabaran dan ketekunannya dalam mengajar, memberikan masukan dan saran selama ini.

6. Segenap pihak yang membantu peneliti dalam mencari berbagai sumber. Terima banyak kepada pihak tersebut karena selalu siap membantu permintaan peneliti selama pengerjaan skripsi. Tanpa mereka, peneliti tidak dapat menemukan sumber-sumber yang digunakan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Tak lupa juga terima kasih ini peneliti ucapkan kepada keluarga kecil, terutama kepada ibu yang sudah menjadi sponsor dana atas perjalanan selama ini. Tak lupa kepada bapak saya yang selalu mendoakan dan memberi petunjuk untuk terus bangkit. Kepada abang satu-satunya, Muhammad Alaudin Muhtarom, terima kasih sudah menjadi kakakku di dunia ini.
8. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada teman-teman yang selama ini sudah menemani membuat kenangan indah di Jogja dan tempat manapun.

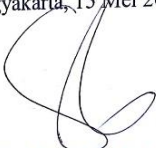
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mereka yang menjadi salah satu rumah yang hangat, nyaman, dan indah serta menjadi obat saat lara menghampiri. Izza Maulidha Sapta Ning Wahyu, Iim Maya Shofa, Ayu Tri Astutik, Muftihatu Rahmah, Syahrul Ahmadil, Faais al-Furqon, 'Aisyah dan Nur Hilmidah. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, maupun jasa kalian selama ini.

9. Tak lupa terima kasih peneliti ucapkan untuk *Bangtan Sonyeondan* (BTS) dan juga Yoon Jeonghan Seventeen yang telah memberikan inspirasi melalui karyanya. Terima kasih telah menemani selama ini.
10. Terima kasih banyak peneliti ucapkan kepada diriku sendiri. Mungkin ini terlihat sepele, namun aku sangat berterima kasih banyak atas semua kerja kerasmu selama ini. Terima kasih sudah bersedia bangkit kembali saat gelap menyelimuti. Terima kasih kamu tidak menyerah terhadap hidup selama beberapa bulan ini. Tetaplah hidup sampai ajal itu menjemput sendiri.

Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua bantuan baik yang didapat selama pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut. Peneliti juga berharap mendapat kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa depan. Semoga penelitian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan sejarah Indonesia.

Yogyakarta, 15 Mei 2023



Shobihatul Badiah
18101020044



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II HAJI SEBELUM KEMERDEKAAN INDONESIA	15
A. Motivasi Jamaah Haji Indonesia Masa Kolonial	15
B. Kebijakan Pada Masa Kolonial Belanda.....	21
C. Kebijakan Pada Masa Jepang.....	33
BAB III: KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN KUOTA HAJI DI INDONESIA TAHUN 1950-1971 M	36
A. Kebijakan Tahun 1950-1966 M	37
B. Kebijakan Tahun 1967-1971 M	78
BAB IV: FAKTOR DAN DAMPAK KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN KUOTA HAJI	92
A. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji	92

1. Faktor Ekonomi	92
2. Faktor Politik	97
3. Faktor Transportasi.....	100
4. Faktor Minat Berhaji	104
B. Dampak Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji	108
1. Jamaah Haji	109
2. Citra Bangsa	110
3. Pemerintah.....	112
C. Perbedaan Pendistribusian Kuota Haji Lama dan Baru (SISKOHAT).....	114
BAB V: PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	169



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Jamaah Haji Indonesia Tahun 1852-1870	24
Tabel 2 Jumlah Jamaah Haji Indonesia Tahun 1880-1900	29
Tabel 3 Jumlah Jamaah Haji Indonesia Tahun 1926-1928	30
Tabel 5 Jumlah Jamaah Haji Indonesia Tahun 1914-1919	31
Tabel 6 Jumlah Jamaah Haji Tahun 1924-1926	32
Tabel 7 Jumlah Jamaah Haji Tahun 1931-1933	33
Tabel 8 Jumlah Jamaah Haji yang Diberangkatkan oleh Pemerintah Belanda Tahun 1946-1949	37
Tabel 9 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1950	40
Tabel 10 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1951	42
Tabel 11 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1952	45
Tabel 12 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1953	47
Tabel 13 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1954	50
Tabel 14 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1955	52
Tabel 15 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1956	54
Tabel 16 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1957	55
Tabel 17 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1958	58
Tabel 18 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1959	60
Tabel 19 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1960	63

Tabel 20 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1961	65
Tabel 21 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1962	67
Tabel 22 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1963	70
Tabel 23 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1964	72
Tabel 24 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1965	74
Tabel 25 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1966	77
Tabel 26 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1967	80
Tabel 27 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1968	83
Tabel 28 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1969	85
Tabel 29 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1970	88
Tabel 30 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1971	90
Tabel 31 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1950-1958	96
Tabel 32 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1955-1966	97
Tabel 33 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1957-1962	98
Tabel 34 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1968 dan 1969	98
Tabel 35 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1969-1971	99
Tabel 36 Pendistribusian Kuota Haji Indonesia Tahun 1957-1962	101
Tabel 37 Pendistribusian Kuota Haji Berdikari Tahun 1967-1969	102
Tabel 38 Pendistribusian Kuota Haji Tahun 1951-1966	103

Tabel 39 Jumlah Pelamar Jamaah Haji dan Pendistribusian Kuota Haji 1950-1971

108

Tabel 40 Perbedaan Pendistribusian Kuota Haji Lama dan Baru (SISKOHAT) di
Indonesia

119



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Panitia Haji (PHI) kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) di Saudi Arabia tanggal 4 April 1950.	132
2. Koran Merdeka tanggal 24 Oktober 1950.	133
3. Koran Suara Rakyat tanggal 5 September 1950.	134
4. Koran Pedoman tanggal 31 Agustus 1950.	135
5. Instruksi Bersama No. C/2/1/5240 tanggal 15 April 1951.	136
6. Daftar Pembagian Kuota Haji dari tahun 1950-1967 M (1370-1386 H).	137
7. Koran Abadi tanggal 10 Agustus 1951.	138
8. Koran Jawa Pos tanggal 9 Mei 1950.	139
9. Suasana Keberangkatan Jamaah Haji di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta tanggal 10 Juli 1950.	139
10. Suasana Keberangkatan Jamaah Haji di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta tanggal 10 Juli 1950.	140
11. Suasana Pemeriksaan Pas (Paspur) Jamaah Haji Sebelum Berangkat ke Mekkah Tahun 1950.	141
12. Suasana Penyaringan atau Tes Ujian Sebelum Penetapan Kuota Tahun 1950.	141
13. Koran Pedoman tanggal 9 September 1950.	142
14. Koran Pedoman tanggal 13 September 1950.	143

15. Berdasarkan Instruksi Bersama No. C/2/1/5240 tanggal 15 April 1951 halaman 6-8 pasal IV.	144
16. Koran Abadi tanggal 31 Juli 1951.	146
17. Koran Abadi tanggal 16 Agustus 1950.	147
18. Resolusi Sidang Tanwir Muhammadiyah tanggal 21-22 Agustus 1951 di Yogyakarta.	148
19. Koran Abadi tanggal 18 Agustus 1951.	149
20. Pengumuman Kementerian Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 1953.	150
21. Surat Edaran Kementerian Agama No. C/II/5747.	151
22. Koran Harian Indonesia tanggal 11 Maret 1953.	152
23. Instruksi Bersama No. 5/1953 tanggal 5 Oktober.	153
24. Koran Suara Masyarakat tanggal 23 Oktober 1953.	154
25. Koran Berita Indonesia tanggal 5 April 1954.	155
26. Koran Waspada tanggal 9 Maret 1955.	156
27. Koran Pewarta Soerabaia tanggal 24 Februari 1955.	157
28. Koran Harian Umum tanggal 19 Maret 1956.	158
29. Koran Harian Umum tanggal 24 Februari 1956.	159
30. Koran Merdeka tanggal 15 Februari 1957.	159
31. Koran Suara Rakyat tanggal 29 Januari 1958.	160
32. Koran Pemandangan tanggal 1 Februari 1958.	161
33. Koran Pemandangan tanggal 25 Februari 1958.	162

34. Koran Surabaya Post tanggal 25 Februari 1959.	163
35. Pengumuman Haji No. 04/1964 Tentang Pembelian Kapal-kapal Haji.	164
36. Koran Abadi tanggal 4 Oktober 1969.	165
37. Koran Abadi tanggal 21 Januari 1971.	166
38. Koran Bintang Timur tanggal 29 Juni 1956.	167
39. Koran Jawa Pos tanggal 28 Agustus 1950.	167
40. Koran Suluh Marhaen tanggal 17 Juni 1969.	168
41. Koran Abadi tanggal 2 Februari 1971.	168
42. Koran Surabaya Post tanggal 17 April 1956.	169
43. Koran Suara Masyarakat tanggal 21 Agustus 1952.	169
44. Koran Suara Masyarakat tanggal 19 Juli 1955.	170
45. Koran Suluh Marhaen tanggal 17 Mei 1969.	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang terakhir dan hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap Muslim yang mampu.¹ Ibadah haji dilakukan setiap tahunnya pada tanggal 8-13 Dzulhijjah yang rangkaian kegiatannya adalah ihram, tawaf, sa'i antara shafa dan marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, lempar jumroh, bermalam di Mina, bercukur atau memotong rambut. Haji merupakan rukun Islam yang cukup rumit, dikarenakan persiapan yang dibutuhkan sangat banyak. Baik dari segi harta, kesehatan fisik maupun non fisik, kesadaran, perjuangan dan pengorbanan.

Pemberangkatan ibadah haji di Indonesia baru dilakukan secara operasional pada masa Kolonial Belanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya Ordonansi Haji yang dikeluarkan untuk pertama kalinya di tahun 1825. Dengan Ordonansi Haji tersebut, pemerintah Belanda berusaha untuk membatasi dan mengawasi para jamaah haji. Seiring waktu, pemerintah Belanda terus berusaha untuk memperketat

¹ Terjemahan Surat Ali Imron ayat 97 adalah "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta. Lihat Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 2. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 31.

kebijakan saat itu. Meskipun sudah diperketat, namun minat masyarakat Indonesia tetap tinggi untuk bepergian ke tanah suci.²

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia tidak langsung menyelenggarakan pemberangkatan haji. Saat itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia masih fokus untuk mengusir Belanda yang berusaha kembali menjajah. Baru di tahun 1950, pemerintah Indonesia untuk yang pertama kalinya menyelenggarakan pemberangkatan haji. Berita pemberangkatan haji juga dimuat di berbagai koran seperti *Pedoman*, *Suara Rakyat* dan *Merdeka*.³ Pemerintah Indonesia mendistribusikan kuota haji kepada 10.000 jamaah haji.⁴ Keterbatasan transportasi dan devisa, serta adanya himbauan dari pemerintah Arab Saudi yang membatasi jumlah jamaah haji, lantaran pemondokan yang minim. Selain itu, cuaca yang ekstrem yang bisa membahayakan jamaah haji.

Pendistribusian kuota haji ini dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Agama No. A/III/1110 tanggal 11 Mei 1950.⁵ Selain itu, Ketentuan mengenai pendistribusian kuota haji dibahas lebih lanjut dalam Instruksi Bersama No. C/2/1/5240 tanggal 15 April 1951.⁶ Didalamnya dijelaskan bahwa pendistribusian ditentukan oleh Kementerian Agama kemudian dibagi kepada setiap provinsi. Gubernur membagi kembali kepada setiap kabupaten/kota di dalamnya.

² Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 411-414. Kementerian Agama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Haji dari Masa ke Masa* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 60-61.

³ *Koran Merdeka* tanggal 24 Oktober 1950. *Koran Suara Rakyat* tanggal 5 September 1950. *Koran Pedoman* tanggal 31 Agustus 1950. Lihat lampiran nomor 2-4.

⁴ Pada tahun 1950, jumlah 10.000 diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai batas minimum, sedangkan untuk maksimalnya sebanyak 15.000.

⁵ Mursyidi dan Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia* (Jakarta: MARS-26, 1984), hlm. 43.

⁶ Lihat lampiran nomor 5.

Pendistribusian ini berdasarkan atas banyaknya penduduk yang beragama Islam dan jumlah pelamar calon haji dalam setiap daerahnya.

Pendistribusian kuota haji tidak pasti setiap tahunnya, terkadang pemerintah Indonesia menambah atau menurunkannya. Contohnya seperti di tahun 1952, 1958, 1962, dan lain sebagainya. Pada masa Orde Lama di tahun 1952, pendistribusian kuota haji ditambah 14.000, sedangkan di tahun sebelumnya hanya 10.000. Pemerintah Indonesia menambah kuota haji yang didistribusikan lantaran di tahun sebelumnya terjadi kegagalan dalam memberangkatkan, hanya 1.843 yang dapat berangkat.⁷ Terdapat berita simpang siur tentang wabah pes dan kolera di Yaman yang mengakibatkan jamaah haji terlantar di pelabuhan.⁸

Tahun 1958, kuota yang didistribusikan oleh pemerintah diturunkan menjadi 8.000, di tahun sebelumnya terdapat 12.000. Lantaran keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil, membuat devisa sebagai alat pembayaran luar negeri berkurang. Hal ini juga berlaku di tahun 1962, pemerintah Indonesia hanya mendistribusikan 7.500.

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia mendistribusikan kuota haji sekitar 15.000-30.000 dari tahun 1967-1971. Pendistribusian kuota haji masa Orde Baru, lebih banyak dibanding masa Orde Lama. Lantaran perekonomian Indonesia yang sudah membaik dan transportasi yang memadai. Namun di tahun 1971, pendistribusian kuota haji dihapuskan hal ini dibuktikan dengan adanya Surat

⁷ Daftar Pembagian Kuota Haji dari tahun 1950-1967 M (1370-1386 H). Lihat lampiran nomor 6.

⁸ Koran *Abadi* tanggal 10 Agustus 1951. Lihat lampiran nomor 7.

Keputusan Menteri Agama No. 50 tahun 1971.⁹ Alasan dihapuskannya pendistribusian ini dikarenakan ekonomi Indonesia yang stabil, semakin menguatnya nilai rupiah, dan kondisi politik yang membaik. Akibat dari dihapuskannya pendistribusian kuota haji, jumlah jamaah haji yang berangkat ke tanah suci tahun berikutnya melonjak menjadi 22.285.¹⁰

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pendistribusian kuota haji di Indonesia pada Tahun 1950-1971 M. Alasan peneliti memilih tempat Indonesia dikarenakan negara tersebut memiliki umat Muslim terbanyak di dunia. Sedangkan alasan peneliti memilih tahun 1950 dikarenakan saat itu pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci yang pertama kali. Selain itu, pendistribusian kuota haji juga mulai diterapkan pertama kali. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama No. A/III/1110 tanggal 11 Mei 1950. Sedangkan Tahun 1971 dipilih dikarenakan pada tahun tersebut pendistribusian kuota haji dihapus, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama No. 50 tahun 1971. Alasan dihapuskannya dikarenakan ekonomi Indonesia saat sudah membaik, dan bisa memberangkatkan jamaah haji sebanyak apa pun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Munculnya Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia?

⁹ Direktorat Jenderal Urusan Haji, *Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji tahun 1971-1972* (Jakarta: Departemen Agama, 1972), hlm. 131.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

2. Mengapa Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia Tahun 1950-1971 Berbeda?
3. Apa Faktor dan Dampak dari Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia Tahun 1950-1971?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pendistribusian kuota haji di Indonesia tahun 1950-1971 M. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang pendistribusian kuota haji di Indonesia
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan tambahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pendistribusian kuota haji di Indonesia maupun tentang pemberangkatan penyelenggaraan haji.
3. Memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan tentang pendistribusian kuota haji di Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Kegunaan untuk menelaah terhadap karya-karya yang telah terbit sebelumnya dan memiliki tema sejenis dengan penelitian yang sedang dikaji peneliti. Tinjauan pustaka dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Karya-karya yang bertemakan haji cukup banyak ditemui baik buku,

skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Namun, kajian mengenai kuota haji belum dibahas secara mendalam.

Pertama, buku dengan judul *Haji dari Masa ke Masa* yang ditulis dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI pada tahun 2012. Sedangkan buku kedua ditulis oleh Mursyidi dan Sumuran Harahap dengan judul *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, Dilengkapi dengan Tata Tertib Mulai dari Indonesia sampai di Arab Saudi dan Kembali ke Tanah Air* yang diterbitkan oleh Mars-26 pada tahun 1986. Isi kedua buku tersebut tidak jauh berbeda yakni membahas mengenai sejarah perjalanan haji dari masa Kolonial Belanda hingga Orde Baru. Kedua buku tersebut lebih fokus terhadap manajemen haji dan penyelenggara haji di Indonesia. Sedangkan perbedaan kedua buku tersebut dengan penelitian ini lebih fokus dalam pendistribusian kuota haji dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian karya-karya sebelumnya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Erica Oktaviana dengan judul “Kebijakan Ongkos Naik Haji (ONH) di Indonesia Tahun 1960-1975 M” yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tentang Ongkos Naik Haji (ONH) dari tahun 1960-1975 M. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji peneliti adalah membahas kebijakan haji yang ditetapkan pemerintah masa Orde Lama maupun Baru. Perbedaannya adalah jika Erica membahas Ongkos Naik Haji

(ONH), penelitian ini lebih fokus terhadap pendistribusian kuota haji dari tahun 1950-1971.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Michael Thibran Masykur dengan judul “Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1950-1955 M” yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini lebih fokus terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan haji dari tahun 1950-1955 baik mengenai kuota, transportasi yang digunakan, dan juga akomodasi. Persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah membahas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada masa Orde Lama. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada peran pemerintah dalam menyelenggarakan haji, waktu yang diteliti hanya 5 tahun saja. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih fokus terhadap pendistribusian kuota haji dan waktu yang diteliti 21 tahun. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Michael.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Rina Farihatul dengan judul “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M” yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Program Studi Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tesis ini membahas kebijakan haji yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia masa Orde Lama. Tahun penelitian Rina lebih panjang dari Orde Lama hingga Reformasi. Terdapat pembahasan mengenai kuota haji, namun hanya dijelaskan secara singkat. Rina menjelaskan kebijakan baik dari kuota, akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Penelitian yang sedang diteliti oleh

peneliti lebih fokus terhadap pendistribusian kuota haji. Penelitian ini lanjutan dari penelitian Rina.

Kegunaan karya-karya tersebut menjadi referensi dalam penelitian ini. Melalui karya-karya di atas, peneliti mendapat informasi tentang penyelenggaraan haji dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dari masa Kolonial Belanda hingga Reformasi. Perbedaan penelitian ini dengan karya-karya yang sudah ada adalah kajian peneliti lebih fokus terhadap kebijakan pendistribusian kuota haji yang pernah diterapkan pemerintah Indonesia pada tahun 1950-1971 M. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan agar lebih mudah memahami permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah politik dan ekonomi. Pendekatan politik digunakan untuk memahami hakikat dan tujuan dari sistem politik, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola dari kelakuan individu dan kelompok yang membantu menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial yang meliputi: kelompok-kelompok *interest*, komunikasi, dan pendapat umum, birokrasi

dan administrasi.¹¹ Dalam penelitian ini, pendekatan politik ini berguna untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah seperti mengeluarkan berbagai kebijakan baik berupa undang-undang, keputusan presiden, instruksi bersama, keputusan menteri, peraturan menteri, dan lain sebagainya untuk menetapkan pendistribusian kuota haji sejak tahun 1950-1971.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan kondisi ekonomi negara maupun masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam menetapkan kuota haji yang akan didistribusikan. Mengingat pemerintah membayar akomodasi di Arab Saudi menggunakan uang asing, bukan rupiah. Selain itu, penetapan jumlah Ongkos Naik Haji (ONH) juga menjadi pertimbangan jamaah haji untuk pergi haji atau tidak.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah kebijakan dari Richard Titmuss. Kebijakan menurutnya adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.¹² Setiap kebijakan memiliki tujuan yaitu menyelesaikan masalah publik dan dipengaruhi dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, transportasi, dan lain-lain yang sedang terjadi. Teori ini digunakan untuk mengetahui alasan ditetapkan kebijakan tentang pendistribusian kuota haji dari tahun 1950 sampai dihapus di tahun 1971.

¹¹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 11.

¹² Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 7.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode ini memiliki empat tahapan yang harus ditempuh yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder. Adapun penelitian ini termasuk ke dalam *Library Research*. Sumber primer yang ditemukan oleh peneliti berupa foto, koran, arsip, laporan, dan juga majalah. Sedangkan sumber sekunder peneliti berupa buku, skripsi, tesis, dan jurnal. Sumber-sumber tersebut peneliti dapatkan di berbagai tempat yaitu: Arsip Nasional Republik Indonesia, Monumen Pers Nasional, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dan lain sebagainya.

Dalam tahapan ini peneliti menemukan beberapa arsip yaitu Arsip Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 jilid 1 nomor 3127 dan jilid 2 nomor 1839. Peneliti juga menemukan Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1970/1971, 1971/1972, dan 1967/1968 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, peneliti mendapat sumber primer berupa koran seperti Koran *Pedoman*, *Abadi*, *Trompet Masyarakat*, dan lain sebagainya. Peneliti juga menemukan majalah-majalah yang terbit di tahun penelitian seperti Majalah *Siaran Hadji*, *Kiblat*, dan *Pehai*.

Sedangkan untuk sumber sekunder, peneliti menemukan beberapa sumber seperti Buku yang berjudul *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*

yang ditulis oleh Mursyidi dan Sumuran Harahap dan diterbitkan tahun 1984. Buku *Indonesia dan Haji* karangan Dick Douwes dan Nico Kaptein diterbitkan tahun 1997. Karya ilmiah yang ditemukan oleh peneliti adalah “Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1950-1955” karya Michael Thibran Masykur mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada “Kebijakan Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 1945-2000” oleh Rina Farihatul Jannah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber yang berfungsi menguji kredibilitas sumber yang telah didapat. Kritik sumber dibagi menjadi dua macam, yaitu: kritik ekstern dan intern.¹³ Kritik ekstern lebih menekankan kepada fisik sumber atau dari segi luarnya, seperti kuas, tinta, gaya tulisan, dan lain sebagainya. Sedangkan kritik intern membandingkan isi sumber-sumber yang telah didapat satu sama lainnya. Pada tahun 1951 diberitakan melalui koran *Abadi* tanggal 18 Agustus bahwasanya pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jamaah haji. Hanya 1.843 orang saja yang dapat diberangkatkan dari 10.000 orang. Berdasarkan koran *Abadi* tanggal 31 Juli 1950 dan juga artikel *Republika* yang berjudul “Haji Dibatalkan, Ribuan Calhaj Tahun 1951 Terlantar di Jakarta” bahwasanya terdapat jamaah haji yang bisa diberangkatkan oleh pemerintah. Dalam koran *Abadi* disebutkan bahwa terdapat 975 orang, sedangkan di artikel tersebut dijelaskan sekitar 900 orang. Apabila ditambah totalnya adalah 1.875 orang yang bisa berangkat ke Mekkah. Namun dalam buku *Laporan*

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77.

Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1385 H/1965-1966 M; 1387 H/1967-1968 M; 1390 H/1970-1971 M yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Urusan Haji jumlah jamaah haji yang bisa diberangkatkan ke Mekkah ada 1.843 orang.

Peneliti tidak bisa mengkonfirmasi data-data yang didapat kepada pihak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mendapatkan data dari pihak sana. Peneliti kemudian berusaha membandingkan jumlah kuota yang peneliti dapatkan dari koran maupun arsip dengan buku *Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Haji yang dikeluarkan masa Orde Lama dan Baru. Selain dengan buku tersebut, peneliti juga membandingkan dengan artikel “Statistik Pelamar Hadji dan Pemberangkatan dari Tahun 1950 s/d 1968” dalam Majalah *Siaran Hadji* No. 3, Thn. 1 Agustus, 1968, hlm. 12.

3. Interpretasi

Langkah ketiga adalah interpretasi atau penafsiran dengan melakukan analisis dan sintesis.¹⁴ Analisis dilakukan dengan cara menguraikan permasalahan yang sedang dikaji dari sumber-sumber yang telah didapat. Sedangkan sintesis adalah menyatukan data-data yang telah didapat menjadi utuh satu kesatuan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa kuota haji yang tidak stabil bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, sosial, ekonomi, kendala dalam transportasi dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi penurunan kuota haji pada tahun 1962 sebanyak 7.500 jamaah. Berkurangnya kuota ini dikarenakan terjadinya konflik pembebasan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda sehingga

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* hlm. 78.

menyebabkan jamaah haji dari wilayah Timur tidak bisa diberangkatkan dan harus diundur tahun depan.

4. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah adalah langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Dalam tahapan penulisan lebih menekankan dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Tahap penulisan ini diharapkan dapat memaparkan pembahasan Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji tahun 1950-1971 secara sistematis dan kronologis sehingga dapat mudah dipahami bagi pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini mudah dipahami, maka penulisan dibagi menjadi lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar penelitian dilakukan dan penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas tentang perkembangan umat Muslim Indonesia melaksanakan ibadah haji. Umat Muslim yang sejak dulu mempunyai semangat yang tinggi untuk bisa pergi melakukan ibadah haji ke Mekkah. Semangat tersebut membuat pemerintah Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada. Pada bab ini juga membahas mengenai kebijakan haji di masa sebelum kemerdekaan, baik masa kolonial Belanda maupun Jepang.

Bab III, menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pendistribusian kuota haji yang pernah berlaku dari tahun 1950-1971. Penjelasan mengenai hal tersebut dibagi menjadi dua bagian, yang pertama membahas masa Orde Lama dan yang kedua masa Orde Baru. Hal ini dilakukan mengingat kepemimpinan antara keduanya berbeda satu sama lain, sehingga kebijakan yang dikeluarkan juga berbeda. Selain itu, untuk mempermudah pembaca untuk memahaminya.

Bab IV membahas tentang faktor dan dampak dari sistem kuota haji ini selama berlangsung, baik dari segi para jamaah haji, citra bangsa maupun pemerintah Indonesia sendiri. Bab ini juga dijelaskan faktor yang mempengaruhi kebijakan pendistribusian kuota haji itu sendiri seperti faktor ekonomi, politik, dan transportasi. Adapun bab ini menjadi pengantar menuju bab akhir. Sedangkan Bab V merupakan penutup yang memuat jawaban atas rumusan masalah yang sudah dijelaskan di awal penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya apabila akan membahas topik yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: Pertama, sebelum Indonesia merdeka, jumlah jamaah haji yang berangkat ke Mekkah meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya faktor politik, pendidikan, sosial, dan juga agama. Jumlah jamaah haji yang kian meningkat setiap tahunnya, membuat pemerintah Belanda mulai membatasi dan mempersulit para jamaah haji yang ingin pergi ke Mekkah. Pemerintah menerapkan Ordonansi Haji dari tahun 1800-1937 untuk membatasi jamaah haji. Pada masa Jepang menjajah, tidak diketahui informasi mengenai penyelenggaraan haji di Indonesia, mengingat saat itu juga terjadi adanya Perang Dunia yang sedang berlangsung.

Kedua, kebijakan pendistribusian kuota haji antara Orde Lama dan Baru berbeda satu sama lain. Pada Orde Lama kebijakan pendistribusian pertama kali dilaksanakan di tahun 1950 berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia No. A/III/I/648 tanggal 27 Maret 1950 dan No. A/III/I/1110 tanggal 11 Mei 1950. Lantaran devisa dan transportasi yang terbatas membuat pemerintah Indonesia membatasi jamaah haji yang akan diberangkatkan. Selain itu, adanya pembatasan dari pemerintah Arab Saudi juga menjadi alasan pendistribusian kuota haji diterapkan. Sedangkan tahun 1971, pemerintah menghapuskan sistem kuota haji dikarenakan ekonomi negara dan bangsa Indonesia sudah bisa memberangkatkan para jamaah sebanyak-banyaknya. Hal

ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 50 Tahun 1971, Radiogram/Monitoring No. 36/1971, dan No. 45/1971.

Ketiga, selama pendistribusian kuota ini diterapkan dan dilaksanakan, kuota haji yang didistribusikan tidak selalu stabil. Terkadang mengalami peningkatan maupun penurunan. Pendistribusian kuota haji ini dikarenakan faktor ekonomi, politik, transportasi, dan minat berhaji di tahun-tahun tersebut. Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan dampak dari kebijakan tersebut membuat jamaah haji memerlukan waktu yang begitu lama untuk bisa pergi ke Mekkah. Jamaah haji juga tidak jarang yang menjadi korban penipuan dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Selain itu, dengan kebijakan pendistribusian haji ini, membuat pemerintah bisa mengatur jamaah haji dan bisa menjaga citra bangsa Indonesia.

B. Saran

Penulisan penelitian ini jauh dari kata sempurna, namun peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan, pembelajaran, maupun pengembangan dalam topik yang serupa dengan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian ini memuat kebijakan jumlah kuota haji, jumlah minat jamaah haji yang mendaftar, jumlah jamaah haji yang diberangkatkan, dan lain sebagainya.

Mengingat hal tersebut peneliti mempunyai beberapa saran untuk disampaikan. Arsip-arsip mengenai jumlah kuota istimewa baik dari tahun 1950-1962 tidak bisa ditemukan, Hal ini dikarenakan kuota istimewa tersebut

tidak tertulis dalam laporan-laporan yang ditemukan oleh peneliti. Selain itu, kuota istimewa ini dipegang oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama yang diberikan langsung kepada para jamaah haji yang memohon langsung kepada mereka. Selain itu, peneliti merasa kesulitan dalam menemukan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah secara langsung di tahun 1955-1959, 1962, dan 1965. Adapun data-data yang peneliti temukan berdasarkan laporan-laporan penyelenggaraan haji di tahun-tahun sesudahnya. Adanya perbedaan mengenai jumlah jamaah haji yang dapat diberangkatkan oleh pemerintah dari sumber-sumber yang didapat oleh peneliti.

Peneliti sadar bahwa hasil penelitian ini lebih dari kata sempurna, namun peneliti tidak menutup dari kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan penelitian ini. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan para pembaca umumnya. Semoga setelah hasil penelitian ini ditulis penyelenggaraan haji di Indonesia semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid I*. Jakarta: Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip. 2011.

_____. *Inventaris Arsip Muhammadiyah 1922-2001*. Jakarta: Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip. 2018.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1969.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969.

B. Surat Kabar Lama

Jogja *Library Center*. *Koran Berita Indonesia* tanggal 5 April 1954.

_____. *Koran Bintang Timur* tanggal 29 Juni 1956.

_____. *Koran Harian Indonesia* tanggal 11 Maret 1953.

_____. *Koran Harian Umum* tanggal 24 Februari 1956.

_____. *Koran Harian Umum* tanggal 19 Maret 1956.

_____. *Koran Jawa Pos* tanggal 9 Mei 1950.

_____. *Koran Jawa Pos* tanggal 28 Agustus 1950.

_____. *Koran Pemandangan* tanggal 1 Februari 1958.

_____. *Koran Pemandangan* tanggal 25 Februari 1958.

_____. *Koran Pewartas Soerabaia* tanggal 24 Februari 1955.

_____. *Koran Waspada* tanggal 9 Maret 1955.

Monumen Pers Nasional, Koran *Abadi* tanggal 31 Juli 1950.

_____. Koran *Abadi* tanggal 10 Agustus 1951.

_____. Koran *Abadi* tanggal 16 Agustus 1950.

_____. Koran *Abadi* tanggal 18 Agustus 1951.

_____. Koran *Merdeka* tanggal 15 Februari 1957.

_____. Koran *Merdeka* tanggal 24 Oktober 1950.

_____. Koran *Pedoman* tanggal 31 Agustus 1950.

_____. Koran *Pedoman* tanggal 9 September 1950.

_____. Koran *Pedoman* tanggal 13 September 1950.

_____. Koran *Suara Masyarakat* tanggal 19 Juli 1955.

_____. Koran *Suara Masyarakat* tanggal 21 Agustus 1952.

_____. Koran *Suara Masyarakat* tanggal 23 Oktober 1953.

_____. Koran *Suara Rakyat* tanggal 29 Januari 1958.

_____. Koran *Suara Rakyat* tanggal 5 September 1950.

_____. Koran *Suluh Marhaen* tanggal 17 Mei 1969.

_____. Koran *Suluh Marhaen* tanggal 17 Juni 1969.

_____. Koran *Surabaya Post* tanggal 17 April 1956.

_____. Koran *Surabaya Post* tanggal 25 Februari 1959.

Perpustakaan Salemba Raya. Koran *Abadi* tanggal 21 Januari 1971.

_____. Koran *Abadi* tanggal 2 Februari 1971.

_____. Koran *Abadi* tanggal 4 Oktober 1969.

C. Buku

Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.

Direktorat Jenderal Urusan Haji. 1966. *Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1385 H/1965-1966 M*. Jakarta: Departemen Agama.

_____. 1968. *Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1387 H/1967-1968 M*. Jakarta: Departemen Agama.

_____. 1971. 1971. *Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1390 H/1970-1971 M*. Jakarta: Departemen Agama.

_____. 1972. *Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1391 H/1971-1972 M*. Jakarta: Departemen Agama.

_____. 1976. *Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1395 H/1975/1976 M*. Jakarta: Departemen Agama.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1965. *Peranan Departemen Agama dalam Revolusi dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Gobee, E. dan Adriaanse. 1993. *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Terj. Sukarsi. Jakarta: INIS.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hurgronje, C. Snouck. 1992. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid X-IX*. Jakarta: INIS.

Kaptein, Nico dan Dick Douwes. 1997. *Indonesia dan Haji*. Terj. Soedarso

Soekarno. Jakarta: INIS.

Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2012. *Haji dari Masa ke Masa*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kementerian Agama. 1950. *Konperensi Kementerian, Departemen, Djawatan Agama Seluruh Indonesia Diadakan di Jogjakarta Tanggal 14-18 April 1950 Jilid I dan II*. Jakarta: Kementerian Agama.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Loir, Henri Chambert. *Naik Haji di Masa Silam Kisah-kisah Orang Indonesia Naik Haji (1482-1964) Jilid I*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Majid, M. Dien. 2008. *Berhaji di Masa Kolonial*. Jakarta: Sejahtera.

Mas'ood, Mohtar/ 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.

Muhaimin, Yahya A. 1990. *Bisnis dan Politik Kebijakan Ekonomi 1950-1988*. Terj. H. Basari dan M. Sugiono. Jakarta: LP3ES.

Mursyidi dan Sumuran Harahap. 1984. *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*. Jakarta: MARS-26.

Nagazumi, Akira. 1986. *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nidjam, Achmad dan Alatief Hanan. 2001. *Manajemen Haji Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Noer, Deliar. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia Edisi Baru*. Jakarta:

CV. Rajawali.

Putuhena, Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Ramayulis. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW Sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia.

Ricklefs, M. C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Siahaan, Bisuk. 2005. "Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir" dalam *Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun 1961-1968*. Yogyakarta: Kanisius.

Steenbrink, Karael A.. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.

Suminto, H. Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wie, Thee Kian. 2005. *Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Terj. Koesalah Soebagyo. Jakarta: Kompas.

Zusneli Zubir, dkk. 2010. *Bunga Rampai Sejarah: Dari Pendidikan Islam Hingga Pelaksanaan Haji*. Sumatera Barat: BPSNT Padang Press.

D. Skripsi dan Tesis

Baihaqi, Ahmad Fauzan. 2015. "Transportasi Jamaah Haji di Embarkasi/Debarkasi Pelabuhan Batavia (Tahun 1911-1930)". Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fajriah, Aufa Nur. 2015. "Pengaruh Pelayanan Karyawan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Terhadap Tingkat Kepuasan Jamaah Pada Kantor Wilayah (KANWIL) Kementerian

- Agama (KEMENAG) Provinsi DKI Jakarta”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fasih, Ulum. 2019. “Pengelolaan Haji oleh Pemerintah dan Lembaga Swasta di Indonesia Tahun 1949-1959”. Tesis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Ismail, Taufik. 2020. “Berhaji Pada Masa Revolusi: Ibadah Haji Dengan Misi Tersembunyi”. Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta.
- Masykur, Michael Thibran. 2019. “Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1950-1955 M”. Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jannah, Rina Farihatul. 2016. “Kebijakan Ordonansi Haji Pada Masa Kolonial di Indonesia Tahun 1869-1932”. Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.
- _____. 2018. “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M”. Tesis Program Studi Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sari, Susi Laela. 2019. “PT. Arafat dalam Perhajian di Indonesia Tahun 1964-1979 M”. Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Oktaviana, Erica. 2022. “Kebijakan Ongkos Naik Haji (ONH) di Indonesia Tahun 1960-1975 M”. Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zamzami, Rizal. 2019. “Kebijakan Ekonomi Sultan Hamengku Buwono IX Pada Awal Orde Baru Tahun 1966-1973”. Tesis Program Studi Kajian Islam Interdisipliner UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Artikel Jurnal dan Majalah

- Dhofier, Zamakhsyari. “Dampak Ekonomi Ibadah Haji di Indonesia”. *Jurnal Prisma* Nomor 4, April, Tahun 1984: 51-61.

Direktorat Djenderal Urusan Hadji. “Kotum Hadji Tahun 1968/1969”.
Majalah Siaran Hadji Nomor 5, Tahun I, 1968: 2.

_____. “Statistik Pelamar Hadji dan Pemberangkatan Dari Tahun 1950
s/d 1968”. *Majalah Siaran Hadji* Nomor 3, Tahun I Agustus, 1968:
12.

Jajasan Perdjalananan Hadji Indonesia. “5 Kapal Hadji Untuk Tahun 1961”.
Majalah Pehai Nomor 21/22, Tahun VI, November/Desember,
1960: 15.

_____. “Daftar Pembagian Kotum Tahun 1963-1964”. *Majalah Pehai*
No. 5/ Tahun X, November/Desember, 1963: 43.

_____. “Tchtisar Angka-angka Pelamar Tjalon Hadji dari Tahun
1953-1959”. *Majalah Pehai* Nomor 19, Tahun VI September, 1960;
11.

_____. “Pembagian Kotum Djemaah Hadji Untuk Tahun 1963”.
Majalah Pehai Nomor 7/8, Tahun IX, Oktober/November, 1962: 15.

_____. “Pembagian Kotum Hadji Untuk Tahun 1970 dan Tahun
1971”. *Majalah Kiblat* Nomor 22, Tahun Ke XVI, April Ke II, 1969:
31.

_____. “Penjelenggaraan Urusan Hadji untuk Musim Hadji 1960”.
Majalah Pehai Nomor 11 Tahun Ke V, Februari, 1960: 24-25.

Rohmatullah, Dawam Multazamy. “Perjalanan Haji Indonesia di Masa
Kolonial”. *Jurnal Qalamuna* Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember,
2017: 115-127.

F. Internet

As’ad, Muhammad. “Seruan Jihad KH. Hasyim Asy’ari Selain Resolusi
Jihad”. [Seruan Jihad KH Hasyim Asy’ari Selain Resolusi Jihad
\(nu.or.id\)](#) diakses pada tanggal 05 November 2022, pukul 13.00
WIB.

Facebook Arsip Nasional Republik Indonesia. Suasana Keberangkatan Jamaah Haji di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta tanggal 10 Juli 1950.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025FTr9TNNjL2YjxQqBeJPvqmF92fEXzDnYwcByGY2WHGR8zkJjCkhvg6MbJmm6pByl&id=147810415382310&sfnsn=wiwspmo&mibextid=VhDh1V. diakses pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 18.00 WIB.

_____. Suasana Keberangkatan Jamaah Haji di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta tanggal 10 Juli 1950.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025FTr9TNNjL2YjxQqBeJPvqmF92fEXzDnYwcByGY2WHGR8zkJjCkhvg6MbJmm6pByl&id=147810415382310&sfnsn=wiwspmo&mibextid=VhDh1V. diakses pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 18.00 WIB.

_____. Suasana Pemeriksaan Pas (Paspor) Jamaah Haji Sebelum Berangkat ke Mekkah Tahun 1950.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02i6pBadeWliC1BfifhKfdJZ5YRmaRoidjPF6cYAPKqKxL4A9U6GJzf3Na62f4KaTil&id=380536335320093&sfnsn=wiwspmo&mibextid=VhDh1V. diakses pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 18.03 WIB.

_____. Suasana Penyaringan atau Tes Ujian Sebelum Penetapan Kuota Tahun 1953.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hKVZBkLCApBL5yfCB33LnDMpbGtFbQGsKfn1oBk3NSom5LKBCy8Jjf52c9Siiavail&id=380536335320093&sfnsn=wiwspmo&mibextid=VhDh1V. diakses pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 18.05 WIB.

Portal Informasi Indonesia (Indonesia.go.id).” Agama”. Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 13.35 WIB.